

ISU STRATEGIS TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NASIONAL DAN INFRASTRUKTUR DAERAH DI KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Fayza Novian¹, Nandito Olip S², Ilham Fauzan³, M Naufal Ghazi⁴

¹²³⁴Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Achmad Yani

Dikirimkan: 05 September 2024

Direvisi: 05 Oktober 2024

Diterbitkan: 08 Oktober 2024

INTISARI

Pembangunan infrastruktur di tingkat nasional dan daerah, seperti di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, menghadapi sejumlah tantangan strategis yang perlu diatasi secara komprehensif. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji secara mendalam tantangan dalam pembangunan infrastruktur nasional dengan fokus pada infrastruktur daerah, membandingkan situasi di Indonesia secara umum dengan kasus spesifik di Kabupaten Mandailing Natal, dan mengkaji bagaimana Indonesia dapat mengatasi tantangan ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu tinjauan literatur yang melibatkan analisis data sekunder berupa informasi dan laporan yang relevan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tingkat nasional dan daerah menghadapi tantangan seperti masalah pembebasan lahan, pendanaan, hingga koordinasi antar instansi. Di tingkat daerah seperti Kabupaten Mandailing Natal, tantangan utama meliputi hambatan proyek akibat pandemi, kondisi jalan buruk, kualitas infrastruktur rendah di pedesaan, dan pemerataan pembangunan. Pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan kebijakan dan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti RPJMN, PIP, dan alokasi anggaran infrastruktur. Namun, upaya berkelanjutan masih diperlukan melalui peningkatan koordinasi, skema pendanaan inovatif, kapasitas SDM, dan integrasi mitigasi bencana untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah, berkesinambungan, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur di tingkat nasional dan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, tetapi pemerintah pusat dan daerah terus berupaya mengatasinya melalui kebijakan dan strategi.

KATA KUNCI

Pembangunan; Infrastruktur; Pemerataan; Tantangan; Pemerintah.

Pendahuluan

Pembangunan dalam suatu negara tentu menjadi hal yang sangat penting, hampir seluruh negara di dunia ini telah memilikinya. Negara tanpa adanya pembangunan akan stagnan, karena negara tersebut akan berhenti dalam satu titik,

Korespondensi:

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat 40531.

Email: fayzanovian335@gmail.com

sedangkan perubahan selalu terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan sekaligus menuntut terwujudnya suatu pembangunan dalam suatu negara, dan untuk mewujudkan pembangunan tersebut dibutuhkan suatu rancangan perencanaan pembangunan yang mantap, terencana dan terarah. Tanpa adanya rancangan yang baik, maka pembangunan tidak akan dapat tercapai dengan baik pula. Dengan demikian, untuk mewujudkan pembangunan yang mantap, terencana dan terarah tentu dibutuhkan waktu yang relatif panjang, apalagi dalam sejarah bangsa Indonesia keberuntangan kurang berpihak, sehingga upaya dan semangat harus lebih ditingkatkan.

Penyediaan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta pelayanan dasar. Pembangunan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah seiring berkembangnya fenomena urbanisasi. Menurut (UNFPA, 2007) dalam (Putri & Putri, 2020) memprediksi pada tahun 2030 sebanyak 4,9 miliar orang di dunia akan tinggal di kawasan perkotaan, yang berdampak pada peningkatan jumlah permintaan terhadap pelayanan infrastruktur perkotaan. Untuk itu pemerintah sedang gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu instrumen pembangunan kota yang berkelanjutan.

Sejak saat pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pembangunan infrastruktur memang menjadi prioritas. Bahkan dapat dikatakan istilah “infrastruktur” sendiri telah melekat pada citra diri pemerintahan saat ini. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menyampaikan betapa pentingnya infrastruktur bagi kemajuan suatu bangsa. “Tanpa infrastruktur, jangan mimpi negara ini bisa bersaing,” ungkap Joko Widodo pada saat itu berulang-ulang di berbagai kesempatan (Utomo, 2017). Pemerintah juga telah menetapkan pondasi dasar pembangunan dengan meletakkan paradigma “Indonesia Sentris” dalam membangun. Hasilnya bisa mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meskipun masyarakat harus sedikit bersabar untuk menikmati berkah pembangunan secara maksimal, karena proses membangun infrastruktur memakan waktu tidak sebentar (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), 2017).

Membangun infrastruktur untuk negara yang memiliki wilayah geografis yang luas ditambah jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia adalah sebuah keharusan. Dengan membangun infrastruktur hingga ke setiap sudut wilayah terluar Indonesia, bukan hanya akan tercipta ruang ekonomi yang baru, lebih dari itu masyarakat akan merasa tertunaikan janji kemerdekaannya. Keberhasilan pembangunan infrastruktur bukan hanya disandarkan kepada pemerintahan saja, tetapi partisipasi masyarakat dalam mengawasi laju pembangunan sangat dibutuhkan. Masyarakat merupakan saksi sejarah perjalanan sebuah bangsa menciptakan peradaban lewat infrastruktur.

Dalam berbagai literatur ekonomi pembangunan, infrastruktur merupakan pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, dan kereta api, maka akan mampu meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik sehingga produk-produk lokal bisa bersaing dengan produk impor. Apalagi pembangunan infrastruktur di bidang energi,

listrik, telekomunikasi, bendungan dan irigasi, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian bangsa ini (Utomo, 2017).

Pembangunan infrastruktur di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan krusial yang perlu diatasi demi meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat (Pribady, 2023). Infrastruktur yang baik tidak hanya memudahkan akses ke layanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah utama dan daerah daerah. Namun, pembangunan infrastruktur nasional sering kali menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam hal distribusi sumber daya dan prioritas yang berbeda antara wilayah-wilayah. Menurut (BPS, 2018) dalam (Kusuma & Muta'ali, 2019) menyatakan bahwa tingkat ketimpangan masih berkembang di Indonesia ditandai dengan indeks gini sebesar 0,389. Perekonomian di Indonesia mengalami ketidakmerataan dalam lingkup kawasan berupa kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) serta lingkup pulau yakni Pulau Jawa dengan beragam pulau lain. Ketimpangan tersebut salah satunya disebabkan oleh pemenuhan infrastruktur yang belum memadai di setiap provinsi. Infrastruktur menurut (Grigg, 1998) dalam (Kusuma & Muta'ali, 2019) diartikan sebagai akumulasi komponen fisik meliputi transportasi, pengairan drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat baik dasar, sosial, maupun ekonomi yang tercakup dalam sistem fisik. Sejak pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengembangkan wilayah otonominya sesuai dengan potensi serta sumber daya yang dimiliki. Salah satu konsep dari otonomi daerah ialah desentralisasi yang memiliki pengertian sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat (Putri & Putri, 2020). Ketersediaan infrastruktur adalah salah satu faktor pendorong produktivitas daerah (Panjaitan et al., 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan et al., 2019) bahwa pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara sudah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur jalan raya seperti jalan kabupaten dan jalan provinsi sudah hampir mencapai seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Panjang jalan di Sumatera Utara mengalami peningkatan secara dramatis yaitu pada tahun 2014 sekitar 35 ribu kilometer menjadi sekitar 39 ribu kilometer tahun 2015, hal ini disebabkan meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten/kota akibat adanya program Dana Alokasi Khusus dan program infrastruktur pemerintah pusat yang melakukan pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Mandailing Natal, sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara, merupakan contoh yang menonjol dari tantangan ini. Wilayah ini memiliki potensi yang besar dalam berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, dan industri pariwisata. Namun, infrastruktur yang kurang berkembang menjadi hambatan utama dalam mencapai potensi tersebut. Jalan raya yang kurus dan tidak berkualitas, sistem listrik yang tidak stabil, serta akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang terbatas adalah beberapa masalah utama yang harus diatasi (Auliyani & Yafiz, 2022).

Penelitian ini menggunakan dua penelitian terdahulu yang berguna sebagai acuan dalam meneliti dengan bersumber dari artikel jurnal. Menurut (Sau, 2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Kajian Perumusan Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026” mendapati bahwa berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia maka Masalah pokok dalam pembangunan Kabupaten Toraja Utara lima tahun kedepan adalah “Tertinggalnya Kualitas Hidup Manusia”. Berdasarkan penilaian isu strategis yang terbobot maka yang menjadi prioritas pertama adalah transformasi pelayanan publik dengan bobot 88,45. Rekomendasi dalam rangka penyelesaian masalah pokok di kabupaten Toraja Utara sesuai periode RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 – 2026 maka perlu: Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengeluaran perkapita, rata-rata lama sekolah Angka Harapan Hidup dan perlu maka perlu dilakukan koordinasi kepada semua perangkat daerah untuk menentukan program program kegiatan yang terukur dan Pritotas utama yang akan didorong selama lima tahun ke depan adalah transformasi pelayanan public Kata Kunci permasalahan isu-isu strategis.

Menurut (Panjaitan et al., 2019) dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan dengan judul “Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara” menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara sudah mampu mengurangi kemiskinan (pro-poor). Namun pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan memperburuk ketimpangan. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tidak inklusif. Pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana infrastruktur jalan meningkatkan akses kesempatan kerja serta distribusi pendapatan yang lebih merata.

Berdasarkan hal di atas, peneliti dapat menemukan *gap analysis* atau kesenjangan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini. Kesenjangan utama dalam penelitian ini terletak pada fokus spesifik pada isu strategis pembangunan infrastruktur nasional dan infrastruktur daerah di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, serta hubungan antara keduanya. Penelitian sebelumnya belum mengkaji aspek ini secara mendalam pada wilayah yang sama. Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar ketertarikan penulis dalam meneliti yakni bahwa meskipun pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan upaya pembangunan infrastruktur, namun masih terdapat kesenjangan antara infrstruktur yang dibangun dan kebutuhan pembangunan infrastruktur di tingkat nasional maupun daerah seperti Kabupaten Mandailing Natal. Infrastruktur yang kurang memadai di Kabupaten Mandailing Natal seperti ajalan raya yang tidak berkualitas menjadi salah satu penghambat peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti akan mengkaji secara mendalam tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur nasional dengan fokus pada infrastruktur daerah serta menyajikan saran atau rekomendasi yang peneliti tawarkan. Peneliti akan membandingkan situasi di Indonesia secara umum dengan kasus spesifik di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana Indonesia

dapat mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa semua wilayah dapat berpartisipasi secara adil dalam pembangunan nasional.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah tinjauan literatur yang melibatkan analisis data sekunder berupa informasi dan laporan yang relevan. Data-data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait. Kemudian, data tersebut dianalisis secara kritis dan disusun dalam bentuk ringkasan yang menggambarkan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur nasional dengan daerah terutama di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang komprehensif dan mendalam mengenai topik tersebut.

Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Tingkat Nasional

Pembangunan nasional (Hasan, 2018) adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tata ruang di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis karena pembangunan yang dilakukan seringkali tidak mengikuti rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pembangunan tersebut juga tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam. Penyebab utamanya adalah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam demi mendapatkan keuntungan jangka pendek, serta adanya konflik pemanfaatan ruang antara sektor-sektor yang berbeda. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan tata ruang, kualitas rencana tata ruang yang rendah, kurangnya acuan pada perundang-undangan tata ruang, serta lemahnya penegakan hukum (Amir, 2018).

Berdasarkan pengalaman dalam fasilitasi dan pendampingan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), terutama yang masuk dalam PSN dan proyek prioritas pada tahun 2017 yang dilansir dalam (Utomo, 2017), bahwa terdapat 3 isu besar yang menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pertama, permasalahan pembebasan lahan masih menjadi faktor penghambat terbesar dalam pembangunan infrastruktur dan menyumbang 30% dari seluruh masalah pembangunan infrastruktur. Pembebasan lahan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur. Jika masalah pembebasan lahan belum selesai, maka tahap pembangunan selanjutnya tidak dapat dilaksanakan. Permasalahan dalam pembebasan lahan meliputi kurangnya alokasi dana untuk pembebasan lahan dan lambannya proses pengadaan lahan. Namun, dengan adanya Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) yang menjadi satu-satunya badan yang membiayai pembebasan lahan untuk proyek strategi

nasional, serta hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, maka proses pembebasan lahan menjadi lebih terkoordinasi dengan baik dan cepat.

Masalah kedua, adalah perencanaan dan penyiapan proyek yang berkontribusi sebesar 27% dalam masalah pembangunan infrastruktur. Permasalahan ini terkait dengan koordinasi antar pemangku kepentingan proyek dan kualitas dokumen proyek. Pembangunan infrastruktur melibatkan banyak pihak, mulai dari penanggung jawab proyek, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat secara langsung. Hal ini menyebabkan sulitnya mencari titik temu dalam merencanakan proyek secara matang. Selain itu, adanya ego sektoral di mana masing-masing sektor merasa memiliki kewenangan besar dalam pembangunan infrastruktur juga sering kali menyebabkan kebuntuan.

Masalah ketiga, adalah pendanaan yang berkontribusi sebesar 25% dari seluruh masalah infrastruktur. Dalam hal pendanaan, pemerintah telah menetapkan 4 (empat) skema, yaitu APBN, BUMN (baik atas inisiatif korporasi maupun penugasan dari pemerintah), swasta dan skema pendanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Pemerintah juga telah memberikan berbagai instrumen pendanaan infrastruktur yang dapat menarik minat investor swasta, terutama dalam skema KPBU, seperti jaminan pemerintah, pembayaran *Availability Payment*, dan dukungan konstruksi seperti *Viability Gap Fund* (VGF). Selain itu, terdapat beberapa instrumen pasar modal yang dikembangkan untuk infrastruktur, seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA).

Lebih lanjut diungkap oleh (Saragi, 2023) bahwa Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan strategis dalam upaya membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Salah satu kendala utama adalah kekurangan pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur, yang menyebabkan kesenjangan infrastruktur yang signifikan di Indonesia. Masalah lain yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur, yang menyebabkan keterlambatan dan inefisiensi dalam pelaksanaan proyek. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam yang dapat merusak infrastruktur secara signifikan dan menghambat upaya pembangunan berkelanjutan.

Demi mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengembangkan beberapa kebijakan dan strategi untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Salah satu strategi utamanya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga telah menetapkan Rencana Infrastruktural Nasional (PIP) untuk mengkoordinasikan upaya pembangunan infrastruktur di berbagai sektor dan lembaga (Saragi, 2023).

Berdasarkan segala permasalahan dan penjelasan yang dapat peneliti temukan, maka dapat dianalisis bahwa ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di tingkat nasional yakni masalah pembebasan lahan, yang menyumbang 30% dari seluruh masalah infrastruktur. Persoalan ini meliputi kurangnya alokasi dana pembebasan lahan dan lambatnya proses pengadaan lahan. Meskipun hadirnya UU Pengadaan Tanah dan peran BLU LMAN telah membantu,

namun masalah ini masih menjadi hambatan signifikan. Kemudian, perencanaan dan penyiapan proyek berkontribusi terhadap masalah infrastruktur. Hal ini terkait dengan masalah koordinasi antar pemangku kepentingan dan kualitas dokumen proyek. Banyaknya pihak yang terlibat dan ego sektoral seringkali menyebabkan kebuntuan dalam perencanaan. Selanjutnya yaitu terkait masalah pendanaan, meskipun pemerintah telah menyediakan skema pendanaan seperti APBN, BUMN, swasta, dan KPBU, serta instrumen pendanaan seperti *Viability Gap Fund* (VGF) dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), namun masih terdapat tantangan dalam menarik investor swasta. Kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur juga menyebabkan keterlambatan dan inefisiensi dalam pelaksanaan proyek. Terakhir, Indonesia rentan terhadap bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan dan menghambat upaya pembangunan berkelanjutan.

Dengan itu, peneliti dapat memberikan saran/rekomendasi bahwa dalam pembangunan infrastruktur di tingkat nasional, diantaranya:

1. Perlu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembebasan lahan dengan memperkuat koordinasi antar instansi terkait dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses tersebut.
2. Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur, serta meningkatkan kualitas dokumen proyek dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten.
3. Pentingnya mengembangankan skema pendanaan yang lebih inovatif dan menarik bagi investor swasta, seperti meningkatkan insentif fiskal, memperbaiki iklim investasi, dan memberikan jaminan yang lebih kuat.
4. Mengintegrasikan aspek mitigasi bencana alam dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur, melalui program pelatihan dan sertifikasi yang terintegrasi.

Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

Daya saing daerah menjadi salah satu tujuan penting dalam proses pembangunan karena pada kenyataannya sebuah daerah, layaknya sebuah perusahaan, juga bersaing dengan daerah lain. Meskipun setiap daerah memiliki karakteristik, potensi dan permasalahan yang berbeda namun setiap daerah saling bersaing. Arti pentingnya daya saing daerah ditunjukkan dari ketimpangan pembangunan antar daerah yang terjadi di Indonesia (Ginting et al., 2016). Pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Proses ini dimulai dari tingkat komunitas, melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat setempat, dewan desa, dan kecamatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator, stimulator, dan fasilitator, pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai departemen di tingkat

distrik untuk berpartisipasi dalam tim Komisi Pembangunan Daerah (Soares et al., 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Auliyani & Yafiz, 2022), pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mandailing Natal. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di kabupaten tersebut. Misalnya, dari 10 perencanaan yang telah disusun, hanya setengahnya saja yang berhasil dilaksanakan. Salah satu faktor penyebabnya adalah pada saat terjadinya Pandemi Covid-19 yang menghambat upaya pembangunan. Pandemi ini berdampak buruk terhadap berbagai sektor, terutama sektor perekonomian, seperti pemotongan anggaran yang walnya dialokasikan untk pembangunan infrastruktur jalan, dialihkan ke anggaran kesehatan, jaminan sosial, dan lain sebagainya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Mandailing Natal juga masih belum mearata dan tertinggal dibandingkan dengan kabupaten tetangga. Jalan berlumpur yang menyerupai lintasan *off-road* masih banyak dijumpai di Kabupaten Mandailing Natal ini, terutama di wilayah pantai barat. Banyak warga yang mengeluhkan kondisi infrastruktur vital ini. Salah seorang warga dengan nama akun Facebook yaitu Mandily Sobirin bahkan memposting video dan foto-foto yang menggambarkan kondisi jalan berlumpu di wilayah pantai barat Mandailing Natal. Dalam keterangannya, Mandily Sobirin menuliskan “masih di titik yang sama, Lintasan Batahan 1 ke Banjar Aur, 08/12/2022. Selamatkan infrastruktur kami dari kehancuran, jalan ini bukan hanya milik pemobil”. Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa jalan tersebut merupakan akses vital bagi para pelajar menuju sekolah mereka, seperti para santri Pesantren Nadwa Air Apa Km.18, SMA Siununukan, SMK Sinunukan, SMP Bintungan Bejangkar, dan SMP Banjar Aur

Gambar 1. Kondisi Salah Satu Jalan di Kabupaten Mandailing Natal



Sumber: (Art.News, 2022).

Sejalan dengan hal tersebut, (Bunda, 2023) juga menjelaskan bahwa meski telah ada perkembangan yang cukup baik, pemerintah daerah masih perlu memperhatikan pembangunan di wilayah perdesaan atau daerah terpencil. Beberapa aspek seperti pembangunan jalan, sekolah, pasar dan kesehatan di daerah tersebut masih belum mencapai standarisasi yang semestinya. Bila kita Lihat pembangunan jalan di daerah

terpencil di Kabupaten Mandailing belum dikatakan memenuhi standarisasi yang baik dimana kita lihat jalan di daerah terpencil seperti Desa Siobon Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal jalannya masih tanah liat sehingga jalan akan becek dan sulit dilalui pejalan kaki maupun kendaraan ketika hujan. Dari masalah jalan tersebut banyaknya anak sekolah yang hendak pergi sekolah mengalami kesulitan yang akhirnya mereka, tidak jadi berangkat sekolah.

Jika kita lihat kondisi pasar di Kabupaten Mandailing Natal pasca kebaran kondisi saat ini masih sangat memperhatikan masih sangat memperhatikan dan belum sesuai dengan standar pasar tingkat kabupaten. Masalah yang terlihat adalah lingkungan pasar yang masih becek dan tata letak lapak yang berantakan, sehingga menyulitkan pembeli untuk mencari barang yang dibutuhkan. Selain itu, sebagian pedagang juga menggunakan badan jalan di sekitar pasar untuk berjualan, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas bagi kendaraan becak dan sepeda motor (Bunda, 2023). Dari problematika tersebut seharusnya pemerintah lebih tegas ke pedagang untuk tidak menggunakan sebagian ruas jalan untuk lapak jualannya dan serta pembangunan pasar lebih ditingkatkan lagi progresnya.

Adapun SDN 364 Kampung Kapas di Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal juga memiliki kondisi bangunan yang memperhatikan. Ruang belajarnya terbuat dari papan yang sudah kropos, serta bagian tiang yang sudah lapuk dan patah akibat usia bangunan yang sudah tua (Bunda, 2023). Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi para siswa dan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Saat musim hujan dengan angin kencang, para siswa bahkan merasa gelisah dan cemas. Meski merupakan sekolah berprestasi di tingkat kecamatan, dengan siswa-siswi yang sering meraih penghargaan dalam lomba MIPA dan cerdas cermat, namun kondisi bangunan sekolah tersebut justru sangat kontras dengan prestasi gemilang yang diraih. Bangunan sekolah yang seharusnya menjadi lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif, malah terlihat tidak terawat dan memperhatikan.

Dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Mandailing natal mengalami peningkatan sebesar 0,86 poin, dengan komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan meningkat 2,97% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan terjadi pada semua komponen IPM, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Komponen IPM dengan pertumbuhan tertinggi adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yaitu meningkat 2,97% dibandingkan tahun 2021 (Hanapi, 2023). Dalam upaya meningkatkan infrastruktur, pemerintah juga telah berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan. Pada tahun 2022, pemerintah telah meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, sehingga kabupaten ini tumbuh dan berkembang dengan baik secara bertahap. Dengan kondisi tersebut, pemerataan ekonomi masyarakat mulai berimbang seiring dengan penyebaran penduduk di berbagai wilayah Kabupaten Mandailing Natal, sehingga IPM meningkat hingga tahun 2022 naik 0,86% (Madinapos.com, 2024).

Demi mengasai kondisi jalan yang memperhatikan dan berlumpur, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah mengupayakan langkah-langkah pada tahun 2022

ddengan memanfaatkan APBD 2023. Kabupaten Mandailing Natal telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 57 Miliar untuk membangun 33 ruas jalan dan 5 jembatan di wilayah kabupaten yang terletak di bagian paling selatan Sumatera Utara ini. Dari 33 ruas jalan tersebut, 10 ruas jalan berada di wilayah pantai barat Mandailing Natal. Anggaran tersebut juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023. Besaran anggaran itu sudah mencakup biaya operasional bidang dan survei konsultan, namun belum termasuk Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dan Dana Intruksi Presiden (Inpres) (Art.News, 2022).

Menurut pernyataan Birul Walidan selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mandailing Natal (Madinapos.com, 2024) bahwa program pembangunan yang dilaksanakan di Mandailing Natal telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan terarah. Beliau menyampaikan bahwa upaya-upaya pembangunan yang dilakukan telah berhasil mengurangi kesenjangan pendapatan di antara seluruh lapisan masyarakat, memperkecil disparitas pembangunan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, serta pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah kabupaten. Berkat upaya-upaya tersebut, Kabupaten Mandailing natal dapat tumbuh dan berkembang secara bertahap dengan baik. Lebih lanjut, Birul Walidan juga mengatakan bahwa pada usia Kabupaten Mandailing natal yang telah mencapai 24 tahun, kabupaten ini semakin mengukuhkan keberdaanya sebagai wilayah dengan kemajuan pembangunan yang cukup cepat, terarah, dan berkesinambungan. Hal ini tidak terlepas dari pondasi pembangunan yang dicanangkan sejak awal berdirinya kabupaten ini pada masa kepemimpinan Alm. Bapak Amru Daulay. Pondasi pembangunan tersebut secara bertahap terus berlanjyy dan mulai dapat diwujudkan, baik dalam hal penataan ruang secara menyeluruh hingga ke tingkat desa, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan pasar, serta pembangunan pelabuhan udara dan laut yang dalam waktu dekat juga akan segera terwujud.

Dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur dan pemerataan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga menaruh perhatian khusus pada wilayah pantai barat. Dedi Iskandar, Gubernur Sumatera Utara, dalam pernyataanya (Aldi, 2023), menyampaikan dukungannya terhadap rencana pemekaran Kabupaten Pantai Barat Mandailing Natal. Pemekaran wilayah ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pantai barat.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal, pemerintah daerah terus melakukan berbagai kegiatan dan meraih capaian pembangunan yang signifikan hingga tahun 2022, beberapa capaian tersebut meliputi (Hanapi, 2023):

- 1) Peningkatan Jalan Nasional sepanjang 106,36 km (pada segmen tertentu) dari batas Tapanuli Selatan sampai batas Sumatera Barat, yang merupakan hasil koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kualitas jalur transportasi, arus barang dan jasa, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah;

- 2) Pemerintah daerah juga berhasil meningkatkan Jalan Provinsi sepanjang 124,93 km, yang dicapai melalui hubungan harmonis dengan pemerintah provinsi untuk menjangkau capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal;
- 3) Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga berhasil meningkatkan kondisi jalan kabupaten hingga mencapai 37,88 km yang tersebar pada 60 ruas jalan, sebuah peningkatan yang cukup besar dalam upaya mencapai kondisi jalan yang mantap;
- 4) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara juga terus dilibatkan untuk melanjutkan pembangunan pasar baru beserta kelengkapan prasarana pendukungnya bersama dengan pemerintah kabupaten agar segera dapat difungsikan;
- 5) Pembangunan Rumah Sakit Umum beserta sarana prasarana pendukungnya terus dilakukan agar secepatnya dapat melayani masyarakat.

Dengan itu, dari beberapa data yang penulis temukan, dapat di analisis bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah berupaya melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan perencanaan BAPPEDA. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti terhambatnya beberapa proyek pembangunan akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan realokasi anggaran dan pemotongan anggaran infrastruktur. Kemudian, kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Mandailing Natal yang masih belum merata dan tertinggal dibandingkan dengan kabupaten tetangga. Banyak jalan yang berlumpur dan sulit dilalui, terutama di wilayah pantai barat. Hal ini menyulitkan akses masyarakat, termasuk para pelajar yang hendak menuju sekolah. Selain infrastruktur jalan, pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan atau daerah terpencil seperti jalan, sekolah, pasar, dan kesehatan masih belum mencapai standarisasi yang semestinya. Kondisi jalan di beberapa desa masih berupa tanah liat yang becek saat hujan, menghambat akses anak-anak sekolah. Kualitas Infrastruktur Pasar dan Sekolah Kondisi pasar pasca kebakaran juga masih belum sesuai standar, dengan lingkungan becek dan tata letak lapak yang berantakan. Selain itu, bangunan sekolah di beberapa daerah juga masih kropos dan tidak layak, meskipun memiliki prestasi akademik yang gemilang.

Meski masih terdapat kekurangan dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mandailing Natal meningkat, dengan peningkatan tertinggi pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pemerintah juga telah mengupayakan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal, termasuk di wilayah pantai barat. Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 57 miliar untuk membangun 33 ruas jalan dan lima jembatan, dengan 10 ruas jalan berada di wilayah pantai barat. Kepala Bappeda Kabupaten Mandailing Natal juga menyatakan bahwa program pembangunan berjalan cukup baik, dengan berhasil mengurangi kesenjangan pendapatan, memperkecil kesenjangan pembangunan pendidikan, dan pemeratakan pembangunan

infrastruktur. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan.

Dari segala temuan yang disajikan, terdapat peneliti analisis bahwa adanya hubungan juga terkait pembangunan infrastruktur di tingkat nasional dengan di tingkat daerah, salah satu contohnya yaitu ketika pemerintah pusat memberikan dukungan dalam bentuk alokasi anggaran, seperti APBN, DAK dan DAU serta kebijakan dan program untuk mendorong pembangunan infrastruktur di daerah. Tidak hanya itu, hubungan keduanya juga dibuktikan dengan adanya pemerataan pembangunan di infrastruktur seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil atau tertinggal menjadi salah satu tujuan pembangunan infrastruktur di tingkat nasional dan daerah, sementara terdapat temuan yang menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sudah berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, termasuk wilayah pantai barat.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di tingkat nasional dan di tingkat daerah mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi dan berkaitan. Arahan, kebijakan dan dukungan dari pemerintah pusat menjadi dasar bagi pembangunan infrastruktur di daerah, sementara tantangan dan kebutuhan di daerah juga menjadi pertimbangan utama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di tingkat nasional dan daerah seperti di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, menghadapi sejumlah tantangan strategis yang perlu di atasi secara komprehensif. Di tingkat nasional tantangan utama yang dihadapi meliputi masalah pembebasan lahan, perencanaan dan penyiapan proyek, pendanaan, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, serta kerentanan terhadap bencana alam. Sementara di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, tantangan yang dihadapi antara lain pelaksanaan proyek pembangunan yang terhambat akibat pandemi Covid-19, kondisi infrastruktur jalan yang buruk dan tidak merata, kualitas infrastruktur di wilayah pedesaan dan daerah terpencil yang masih rendah, serta kendala dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah kabupaten. Dengan demikian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah berupaya mengatasi tantangan tersebut melalui berbagai kebijakan dan strategi. Di tingkat nasional, pemerintah telah mengembangkan kebijakan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Infrastruktur Nasional (PIP) untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Sedangkan di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk membangun jalan dan jembatan serta meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah kabupaten, termasuk di wilayah pantai barat.

Meskipun telah mencapai kemajuan, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah, berkesinambungan, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan

koordinasi antar pemangku kepentingan, pengembangan skema pendanaan yang inovatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi aspek mitigasi bencana alam dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Dengan mengatasi tantangan tersebut, pembangunan infrastruktur di Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah negara, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Berangkat dari kesimpulan tersebut, berikut adalah saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mandailing Natal: (1) perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Koordinasi yang baik akan memastikan terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal, termasuk di daerah terpencil dan wilayah pantai bara. Dengan koordinasi yang efektif, pembangunan infrastruktur dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. (2) diperlukan peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah daerah perlu meningkatkan porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, terutama untuk membangun jalan yang berkualitas dan layak, serta infrastruktur penunjang lainnya seperti sekolah dan fasilitas kesehatan yang memadai. (3) perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan terkait pembangunan infrastruktur. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang optimal.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Noer Apptika Fuji Lestari, S.IP., M.Si selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penulisan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para peneliti dari berbagai sumber referensi yang telah memperkaya wawasan dan pengetahuan peneliti dalam membahas topik pembangunan infrastruktur di Indonesia. Semoga jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menjadi bahan referensi yang bermanfaat bagi para pembaca.

Pendanaan

Penyusunan artikel dan proses publikasi penelitian ini tanpa adanya pendanaan dari pihak manapun. Proses penyelesaian penelitian hanya

memanfaatkan sumber yang tertera di internet atau informasi data secara *online* sesuai *literatur review*.

Daftar Pustaka

- Aldi, N. (2023). *Dedi Iskandar Dorong Percepatan Pemekaran Pantai Barat Mandailing*. DetikSumut. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7090898/dedi-iskandar-dorong-percepatan-pemekaran-pantai-barat-mandailing>
- Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i1.497>
- Art.News. (2022). *Bak Lintasan Offroad, Pemkab Madina Fokus Pembangunan Infrastruktur Jalan*. ArtNews. <https://startnews.co.id/bak-lintasan-offroad-pemkab-madina-fokus-pembangunan-infrastruktur-jalan/>
- Auliyani, M., & Yafiz, M. (2022). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan Di Daerah Kabupaten Mandailing Natal). *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(2). <https://journal-nusantara.com/index.php/J-CEKI/article/view/148/127>
- Bunda, B. (2023). *Problematika dan Solusi Pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/bidadaripermatabungda9324/6516828008a8b5119114f992/problematika-dan-solusi-pembangunan-di-kabupaten-mandailing-natal>
- Ginting, A., Supriyono, B., & Noor, I. (2016). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing (Studi Pada Provinsi Bengkulu). *Jurnal Wacana*, 19(1). <https://media.neliti.com/media/publications/163326-ID-perencanaan-pembangunan-daerah-dalam-ran.pdf>
- Hanapi, M. (2023). *Ini Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022*. MO: Mandang Online Situs Berita Mandailing. <https://www.mandailingonline.com/ini-capaian-kinerja-pemerintah-kabupaten-mandailing-natal-tahun-2022/>
- Hasan, S. (2018). Sistem Perencanaan Pembangunan dalam Penataan Hukum Nasional. *Meraja Journal*, 1(3), 55–65. <https://media.neliti.com/media/publications/284688-sistem-perencanaan-pembangunan-dalam-pen-eb279cb3.pdf>
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). (2017). *PENYELENGGARAAN PAMERAN FOTO INFRASTRUKTUR DENGAN TAJUK: MEMBANGUN INFRASTRUKTUR NEGERI, KUATKAN BHINNEKA TUNGGAL IKA*. KPPIP. <https://kppip.go.id/siaran-pers/penyelenggaraan-pameran-foto-infrastruktur-tajuk-membangun-infrastruktur-negeri-kuatkan-bhinneka-tunggal-ika/>
- Kusuma, M., & Muta'ali, L. (2019). Hubungan Pembangunan Infrastruktur dan Perkembangan Ekonomi Wilayah Indonesia. *Jurnal Bumi Indonesia*, 8(3). <https://core.ac.uk/download/pdf/295176866.pdf>
- Madinapos.com. (2024). *Progres Pembangunan 24 Tahun Kabupaten Mandailing Natal, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Disegala Bidang*. Madina Pos. <https://madinapos.com/2023/03/04/progres-pembangunan-24-tahun->

- kabupaten-mandailing-natal-mewujudkan-pemerataan-pembangunan-disegala-bidang/
- Panjaitan, H. A. M., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2019). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.29898>
- Pribady, M. L. (2023). *Simak! Ini Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Indonesia 2024*. Detikfinance. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-7060691/simak-ini-arrah-kebijakan-pembangunan-infrastruktur-indonesia-2024>
- Putri, N., & Putri, L. (2020). Analisis pembiayaan non-anggaran pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Infrastruktur*, 6(2), 91–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/infrastruktur.v6i2.1278>
- Saragi, M. (2023). MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN: KONTRIBUSI INSINYUR SIPIL UNTUK MASA DEPAN (Building Sustainable Infrastructure: The Contribution of Civil Engineers to the Future). *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 4(1), 28–35. <http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/177/54>
- Sau, Y. R. (2021). Kajian Perumusan Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021–2026. *Majalah Media Perencana*, 2(1), 75–99. <https://www.mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/28/15>
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(2). <https://www.neliti.com/publications/42401/peranan-pemerintah-daerah-dalam-perencanaan-pembangunan-daerah>
- Utomo, W. (2017). TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. <https://kppip.go.id/opini/tantangan-pembangunan-infrastruktur-indonesia/>

Tentang Penulis

Fayza Novian, Nandito Olip S, Ilham Fauzan, M Naufal Ghazi merupakan mahasiswa/I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani.

Noer Apptika Fuji Lestari merupakan dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani.